



RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.

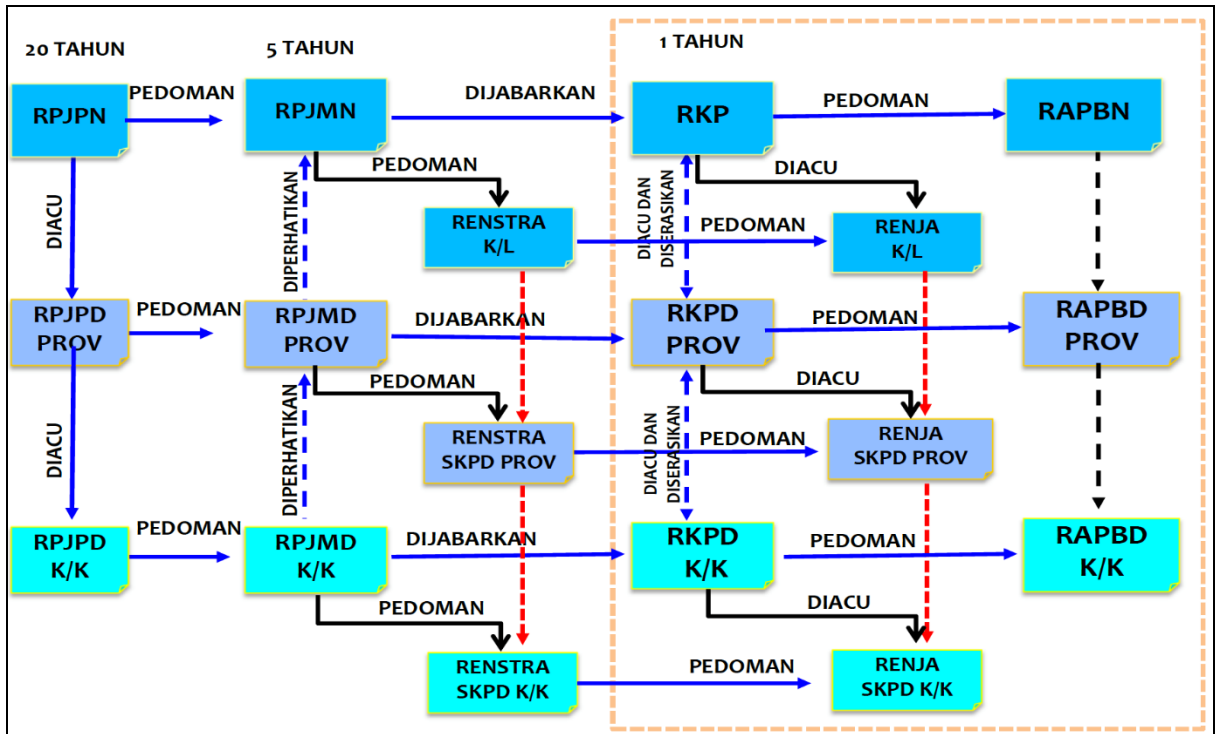
Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Diskopindag Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Diskopindag
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra

Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra (Perubahan) Diskopindag Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta

- Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Diskopindag Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD (Perubahan) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 1

Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra (Perubahan) Diskopindag Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD (Perubahan) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Diskopindag;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Diskopindag;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Diskopindag dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Diskopindag Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Sampang 2019-2024, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Diskopindag, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Diskopindag, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Hasil telaahan terhadap RTRW, dan Hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskopindag

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Diskopindag Provinsi Jawa Timur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

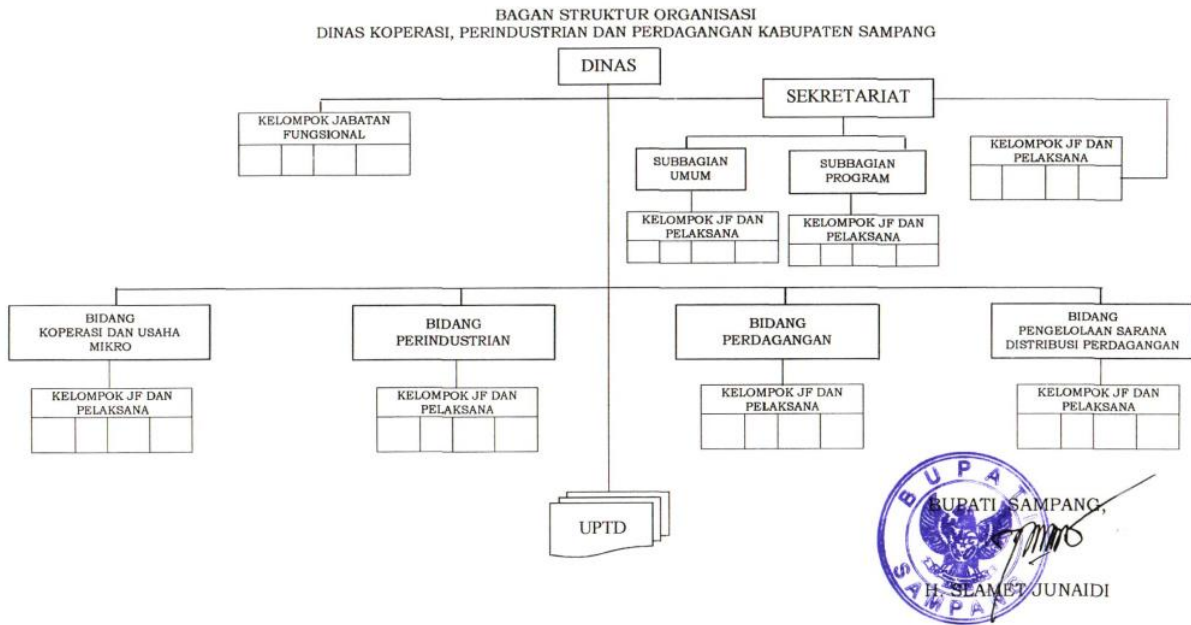
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang terbentuk setelah adanya perubahan Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang No. 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati No. 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang dan telah diubah dengan keluarnya Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian serta tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan serta Perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan serta Perindustrian ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan serta Perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan serta Perindustrian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut Diskopindag, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Sekretaris dan 4 (Empat) Kepala Bidang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi Diskopindag berikut ini.



DISKOPINDAG memiliki Susunan Organisasi yang memiliki tugas dan fungsi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perindustrian, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perdagangan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD Dinas; dan

Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Secara terperinci, tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang dan struktur di bawahnya dijelaskan dalam rincian keterangan berikut ini.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta bertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (maintenance);
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- 1) Sub bagian Umum;
- 2) Sub bagian Program.

A. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyusunan rencana kegiatan pembangunan, pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia serta pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. pelaksanaan pembinaan serta pengembangan penataan organisasi dan tatalaksana Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. penyusunan pedoman pembinaan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan serta manajemen kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Sumber daya Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. pelaksanaan Penyuluhan Perkoperasian dan Usaha Mikro;

- f. pelaksanaan advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian dan Usaha Mikro;
- g. penyusunan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. pelaksanaan pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan serta pengembangan produksi, dan restrukturisasi koperasi dan usaha mikro;
- i. pelaksanaan pengembangan iklim usaha dan daya saing serta kondisi yang mendorong pertumbuhan usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. fasilitasi akses permodalan, pembiayaan dan jasa keuangan bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- k. pelaksanaan bimbingan pengembangan pemasaran dan kemitraan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang perindustrian. Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi industri kecil menengah;
- b. penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan industri kecil menengah;
- d. penyiapan perencanaan dan pengembangan industri kecil menengah;
- e. pengkoordinasian pengembangan industri kecil menengah;
- f. penyelenggaraan pengawasan perizinan di bidang industry kewenangan Kabupaten ;
- g. penyediaan informasi industri untuk Sstem Informasi Industri Nasional (SIINas) kewenangan Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

C. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang perdagangan. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil-hasil produk daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan misi dagang bagi produk daerah;
- c. penyiapan pelaksanaan kegiatan resi gudang;
- d. penyiapan pelaksanaan sosialisasi untuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
- e. fasilitasi pelaksanaan pendampingan terhadap pelanggaran perlindungan konsumen;
- f. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan monitoring pelaku usaha perdagangan;
- g. penyiapan pelaksanaan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan usaha gudang; perdagangan minuman beralkohol, bahan berbahaya, barang dalam keadaan terbungkus, barang kadaluarsa, barang bersubsidi, barang kebutuhan pokok dan barang penting ;
- h. penyiapan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera serta pengawasan pada alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) ;
- i. penyiapan penyusunan informasi harga pasar, dan pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan/stock barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang strategis lainnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan usaha perdagangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang pengelolaan pasar. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pusat perdagangan dan perbelanjaan yang prospektif sebagai sumber pendapatan daerah;
- b. pemantauan, pengkoordinasian kegiatan yang berkaitan dengan retribusi pasar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pendapatan pasar dengan menggali sumber-sumber potensial dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan retribusi;

- d. penyelenggaraan kegiatan operasional pendapatan Pasar dengan penertiban penerimaan dan penagihan pada Pasar-Pasar daerah, sebagai sumber pemasukan yang potensial;
- e. pelaksanaan kerjasama untuk penyusunan program pengembangan penataan Pasar;
- f. pengendalian semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Pendapatan dan Penataan Pasar, sebagai bahan untuk pengkajian dan laporan;
- g. pengkoordinasian kegiatan pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar;
- h. pelaksanaan kerjasama untuk penyusunan program kebersihan ketertiban, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan;
- i. pengendalian semua kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Pasar;
- j. pengendalian perbaikan, pengaturan lampu pasar, air bersih dan memelihara lingkungan pasar;
- k. pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan dan pengelolaan pembuangan sampah dari dalam pasar ke tempat pembuangan sementara; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

E. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

SDM Diskopindag Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan fungsional tertentu dan fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Diskopindag Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
(Tahun 2023)

No	Gol/Eselon	Jumlah (org)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	PNS		
	Gol. I	0	
	Gol. II	45	2
	Gol. III	29	13
	Gol. IV	6	2
2.	CPNS	-	-
3.	Honor daerah	2	
4.	Magang	208	8
Jumlah		290	25

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Diskopindag Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskopindag Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Sarana dan Prasarana Diskopindag Kabupaten Sampang
(Tahun 2023)

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung (Ged Kantor, Pasar, Gudang, Bengkel)	35	Baik
2	Kendaraan Dinas		
	- Roda Empat	4	Baik
	- Roda Dua	54	Baik

	- Roda Tiga	14	
3	Almari Besi	15	Baik
4	AC	26	Baik
5	Komputer	10	Baik
6	Printer	24	Baik
7	LCD	2	Baik
8	Laptop	27	Baik

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2023

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan DiskopindagKabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan DiskopindagKabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja, dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2023

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskopindag Kabupaten Sampang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
		NSPK	IKK	Indikator	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
				Lainnya	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)						
DISPERDAGPRIN																						
1	Nilai ekspor perdagangan				12,10	13,90	15,50	17,00	19,40	22,30	12,01	12,42					99,26	89,35	96,154			
2	Volume usaha perdagangan				870,80	888,20	905,90	924,10	942,60	961,40	878,38	873,85					100,87	98,38	100,24			
3	Persentase pertumbuhan industri formal				2,60	3,13	3,17	2,80	3,27	3,16	2,75	2,97					105,77	94,89	154,89			
4	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis				291	306	322	340	359	381	308,43	376,37					105,99	123,00				
DISKUMNAKER																						
1	Persentase koperasi aktif bersertifikat				49,09	50,90	51,97	53,02	53,90	55,12	47,06	50,9					95,86	100,00	99,307			
2	Persentase Peningkatan SHU				4,99	5,05	5,05	5,07	5,15	5,27	4,79	5,26					96,00	104,19	556,24			
3	Persentase Pertumbuhan usaha mikro				1,01	1,08	1,15	1,22	1,28	1,33	1,41	1,35					140,02	124,99	402,61			

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Tar get	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-						
		NSPK	IKK	Indikat or	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
				Lainny a	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)							
DISKOPINDAG																							
1	Persentase koperasi aktif bersertifikat						51,97	53,02	53,90	55,12											99,31		
2	Persentase Peningkatan SHU						5,05	5,07	5,15	5,27											556,24		
3	Persentase Pertumbuhan usaha mikro						1,15	1,22	1,28	1,33											402,61		
4	Indikator Tujuan : Nilai ekspor perdagangan dalam negeri						13,00	13,11	13,41	13,93				12,5	13,93	14,06					96,15	104,83	
5	Indikator Sasaran : a. Volume usaha perdagangan						875,90	884,10	892,90	902,80				877,99	925,7	961,32					100,24	107,66	
6	Indikator Sasaran : b. Persentase pertumbuhan industri formal						3,17	2,80	4,73	4,89				4,91	4,68	5,52					154,89	116,7	
7	Indikator Sasaran : c. Persentase Koperasi Sehat								51,06	51,39	52,05				51,06	49,17					100	95,68	
8	Indikator Sasaran : b. Persentase Pertumbuhan UM Mandiri								3,48	17,09	17,32				18,14	12,12					19,18	70,92	

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2023

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayanan Diskopindag Kabupaten Sampang

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)	1	2	3	4	5	6
DISPERDAGPRIN																		
Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran																		
Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1.056.575.000	1.224.513.655					963.722.812	1.143.220.695					91,21	93,36				
Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	137.605.000	40.444.570					128.013.580	39.798.960					93,03	98,40				
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	119.650.000	76.700.000					119.509.650	76.554.300					99,88	99,81				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	51.240.000	54.273.300					50.941.630	53.897.750					99,42	99,31				

Pengadaan/pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	100.000.000	43.734.375					99.368.275	43.628.650					99,37	99,76				
Pengadaan/pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	2.375.000					29.980.000	2.375.000					99,93	100,00				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	39.000.000	-					33.019.000	-					84,66					
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik																		
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	15.000.000	10.000.000					14.995.000	9.990.000					99,97	99,90				
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	15.000.000	10.000.000					14.940.000	10.000.000					99,60	100,00				
Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	15.000.000	7.500.000					15.000.000	-					100,00	-				

Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan																		
Pembinaan Usaha Perdagangan, Promosi dan Pemasaran	519.000.000	68.200.000					500.519.700	61.674.900					96,44	90,43				
Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Metrologi Legal	1.493.500.000	112.488.900					1.427.586.810	111.261.500					95,59	98,91				
Pengelolaan Informasi Perdagangan dan Penyaluran Barang dan Jasa	100.000.000	89.460.000					99.695.000	87.468.500					99,70	97,77				
Fasilitas Dekranasda		463.524.050						423.608.012						91,39				
Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Daerah																		
Pengembangan Pasar Tradisional	5.637.790.000	1.134.408.500					5.431.424.519	1.114.741.160					96,34	98,27				
Pengelolaan Pendapatan Pasar	590.930.000	677.897.000					555.229.325	636.860.450					93,96	93,95				

Peningkatan Pengawasan Pasar	1.397.085.000	1.524.945.690					1.375.201.000	1.520.576.600					98,43	99,71				
Program Pembinaan Lingkungan Sosial																		
Pembangunan Rehabilitasi Pemeliharaan Pasar	1.003.300.000	10.317.160					-	6.288.000					-	60,95				
Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih	119.200.000						-											
		703.420.000																
Program Penataan dan Pengembangan Industri																		
Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Menengah	782.300.000	359.241.050					706.541.496	359.186.550					90,32	99,98				

Peningkatan Teknologi, Desain dan Standarisasi Industri	495.255.000	209.778.850					478.928.750	209.105.550					96,70	99,68				
Pembinaan dan Pengawasan Industri	34.105.500	36.914.900					30.134.500	36.175.950					88,36	98,00				
Program Pembinaan Lingkungan Sosial																		
Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat	127.500.000	150.000.000					-	-					-	-				

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)	1	2	3	4	5	6
DISKUMNAKER																		
Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran																		
Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	335.666.600	461.864.500					330.185.473	407.551.338					98,37	88,24				

Penyediaan sarana administrasi perkantoran	112.400.000	88.713.185					107.931.600	78.991.325					96,02	89,04				
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	168.678.000	93.182.000					154.408.875	65.819.010					91,54	70,63				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	44.269.800	11.745.500					43.328.900	8.854.000					97,87	75,38				
Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional	82.100.000	51.820.000					74.167.000	50.188.000					90,34	96,85				
Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	182.770.000	102.124.000					179.305.280	98.340.000					98,10	96,29				

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	37.100.000	11.000.000					15.700.000	-					42,32	-				
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik																		
Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	15.000.000	13.666.975					11.375.000	12.047.500					75,83	88,15				
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	10.000.000	9.996.250					9.999.975	9.949.700					100,00	99,53				
Peningkatan pelayanan informasi publik	15.000.000	7.700.000					15.000.000	-					100,00	-				

Program Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja																		
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	165.125.100						164.283.325						99,49					
Fasilitasi hubungan industrial	84.485.000	50.255.000					67.507.110	33.890.000					79,90	67,44				
Fasilitasi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	194.840.000	103.947.500					188.206.600	89.767.645					96,60	86,36				
Program Pembinaan Lingkungan Sosial																		
Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	642.146.000	622.149.000					526.009.480	559.902.056					81,91	89,99				
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan	186.326.000	275.270.000					178.492.760	275.270.000					95,80	100,00				

Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat	67.570.000						-											
Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan		165.025.000						144.752.000						87,72				
Program Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro																		
Penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana koperasi dan usaha mikro	194.500.000	96.369.740					194.499.306	96.369.740					100,00	100,00				
Pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro	218.055.000	241.430.735					194.734.710	226.030.210					89,31	93,62				
Advokasi koperasi dan usaha mikro	77.363.500						77.363.500						100,00					
Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah (PK2UKM)		417.358.000					-	381.427.367						91,39				

Program Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro																		
Peningkatan usaha ekonomi produktif dan kreatif bagi KUM	340.335.000	239.673.000					334.236.000	229.773.000					98,21	95,87				
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan usaha mikro	197.956.750	174.053.100					178.383.100	170.797.676					90,11	98,13				
Pengembangan sarana pemasaran produk koperasi dan usaha mikro	863.425.000	307.625.000					450.177.928	300.121.500					52,14	97,56				

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	6 (2024)	1	2	3	4	5	6
DISKOPINDAG																		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI																		
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			93.940.934	81.895.339	45.212.814				74.660.500	79.395.000	42.973.000				79,48	96,95	95,05	
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota			48.695.240	68.103.816	-				41.101.200	58.321.500	-				84,40	85,64	-	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI																		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			459.180.503	404.199.236	455.486.550				397.777.600	343.257.100	426.708.000				86,63	84,92	93,68	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																		

Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			30.596.030	48.898.325	23.609.203				28.025.400	47.265.000	22.908.000				91,60	96,66	97,03
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			12.483.396	52.194.791	-				12.351.022	50.540.100	-				98,94	96,83	-
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					147.264.544						145.158.000					-	98,57
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			154.275.790	200.552.449	173.642.606				153.205.500	184.403.989	150.094.797				99,31	91,95	86,44
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM																	
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			327.797.478	321.479.628	43.756.265				325.070.300	312.416.700	40.042.500				99,17	97,18	91,51
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH																	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.000.000	1.984.730	557.744				3.575.000	1.955.250	557.550				89,38	98,51	99,97
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.999.988	779.988	1.999.888				3.999.000	769.800	1.999.800				99,98	98,69	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			3.999.988	779.988	999.988				3.999.000	769.000	999.900				99,98	98,59	99,99
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.999.988	779.988	1.999.888				3.989.000	769.000	1.999.725				99,73	98,59	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			3.999.988	779.988	999.988				3.989.000	769.000	999.775				99,73	98,59	99,98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.999.875	1.134.875	1.336.610				3.580.000	1.110.000	1.336.500				89,50	97,81	99,99
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.203.357.973	10.536.872.784	8.840.829.019				9.978.518.863	9.203.995.302	8.605.115.335				89,07	87,35	97,33

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			34.836.623	-	-				34.817.620	-	-				99,95	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.999.970	1.014.970	999.845				3.999.800	1.014.750	999.000				100,00	99,98	99,92
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			3.999.396	1.014.970	999.845				3.999.000	1.014.925	998.500				99,99	100,00	99,87
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH																	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			18.885.000	14.929.000	-				10.120.000	14.297.000	-				53,59	95,77	-
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan			358.364.774	-	-				253.371.500	-	-				70,70	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-						-						
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11.999.444	14.959.002	14.511.536				11.998.700	14.959.000	14.472.400				99,99	100,00	99,73
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.844.132	45.844.132	19.989.900				40.968.150	45.843.500	19.259.500				89,36	100,00	96,35
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.881.268	18.723.648					39.580.000	18.583.500					96,82	99,25
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			21.999.390	34.899.717	16.052.975				21.999.200	34.899.500	14.775.725				100,00	100,00	92,04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600.000	3.840.000	2.760.000				3.380.000	3.470.000	2.640.000				93,89	90,36	95,65
Fasilitasi Kunjungan Tamu			14.997.500	19.995.000	7.000.000				11.900.000	12.272.500	7.000.000				79,35	61,38	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			99.785.000	142.121.000	116.707.000				91.732.859	137.898.207	115.800.638				91,93	97,03	99,22
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																	

Pengadaan Mebel			-	-	-				-	-	-						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			64.639.127	28.162.500	6.292.810				64.526.000	27.593.000	6.250.000			99,82	97,98	99,32	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	61.756.495	-				-	61.558.000	-			99,68	-		
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.992.000	2.984.000	1.090.000				2.077.000	1.047.800	740.000			69,42	35,11	67,89	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			825.900.935	789.736.029	825.297.348				710.726.290	780.363.087	811.267.119			86,05	98,81	98,30	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			153.000.000	144.000.000	144.000.000				146.250.000	125.250.000	144.000.000			95,59	86,98	100,00	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			89.400.000	69.600.000	61.700.000				73.184.614	68.522.525	61.059.872				81,86	98,45	98,96
Pemeliharaan Mebel			4.960.000	-					-	-	-						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9.800.000	14.800.000	6.200.000				9.644.500	14.734.400	6.150.000				98,41	99,56	99,19
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			49.920.000	49.920.000	136.396.800				49.882.575	49.189.523	130.512.350				99,93	98,54	95,69
PENATAAN ORGANISASI																	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			15.980.000	-	-				-	-	-						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																	
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																	

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			288.995.436	1.034.206.805	340.997.870				275.332.126	999.378.431	224.551.768				95,27	96,63	65,85
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			-	-	-				-	-							
PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA																	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			1.549.095.460	1.549.991.134	1.350.991.726				1.545.596.500	1.546.423.150	1.350.982.250				99,77	99,77	100,00
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			517.635.404	522.563.615	481.602.389				517.222.800	522.485.600	481.592.000				99,92	99,99	100,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																	
MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			57.509.828	25.515.057	518.981.063				57.475.500	22.439.000	518.858.000				99,94	87,94	99,98

PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR																		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			75.021.421	62.999.532	53.966.000				74.439.900	62.270.000	53.965.000			99,22	98,84	100,00		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																		
PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN																		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			167.329.572	121.987.647	83.999.000				163.481.000	117.419.700	83.359.000			97,70	96,26	99,24		
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			6.570.000		-				6.570.000	-	-			100,00	-	-		
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																		
PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI																		

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			100.216.440	259.486.080	163.862.472				94.809.865	250.280.050	161.950.250				94,61	96,45	98,83
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			211.011.488	118.023.911	79.174.059				191.489.065	110.052.350	74.817.500				90,75	93,25	94,50
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																	
PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA																	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			-	177.516.563	-				-	177.406.250	-				99,94	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			595.494.208	-	-				111.437.400	-	-				18,71	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			370.739.832	291.211.280	242.674.748				369.347.025	231.165.550	241.892.725				99,62	79,38	99,68
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			3.334.345.407	30.813.023	-				3.301.707.300	30.637.000	-				99,02	99,43	-

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA																	
PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPIU), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			21.508.838	15.205.447	20.818.156				21.505.650	15.191.375	20.761.875				99,99	99,91	99,73
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA																	
PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPIU, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN																	
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas			80.224.269	20.769.388	18.170.893				80.174.125	20.726.275	18.168.000				99,94	100	99,98

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar 2,00 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 5,06 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Diskopindag yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Diskopindag yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 0,63 persen dan realisasinya sebesar 1,34 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Pengembangan data/informasi dengan pertumbuhan target sebesar 35,64 persen dan realisasinya sebesar 15,60 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut terdapat kegiatan Peningkatan Infrastruktur Data Spasial dalam rangka mendukung Perencanaan Pembangunan yang ber HTIS (*Holistic, Thematic, Integratif and Spacial*). Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target sebesar (40,00) persen dan realisasi sebesar (40,00) persen. Hal ini dikarenakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN tidak dianggarkan setiap tahun melainkan dianggarkan sesuai dengan kebijakan daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi

Tabel 2.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Diskopindag
Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2021 terhadap
Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra Kementerian

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra PD Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian
1	2	3	4	5
1	Volume usaha perdagangan	100,00	1. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan, Standarisasi dan HKI 2. Meningkatnya Net Ekspor Non Migas Perdagangan Luar Negeri. 3. Meningkatnya Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa 2. Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional 3. Meningkatnya Diversifikasi Pasar
2	Nilai bersih ekspor perdagangan	100,00		
3	Persentase pengaduan konsumen yang telah ditindaklanjuti	100,00		
4	Presentasi pertumbuhan industri formal	100,00		

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra PD Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian
1	2	3	4	5
			4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	dan Produk Ekspor 4. Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif)

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara Renstra Diskopindag Kabupaten Sampang dengan Renstra Disperindag Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra Diskopindag yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Propinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik propinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan Diskopindag tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Disperdagprin. Namun demikian dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW tersebut

demikian terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Diskopindagmendukung dalam pencapaian tujuan:

- a. Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- b. Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Tabel 2.2
Analisis Capaian Indikator TPB sesuai tugas dan fungsi pelayanan Disperdagprin

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN 2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Diskopindag
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	n/a	n/a	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	-	Tidak tersedia data	Diskopindag
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	40 orang	40 orang	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	Diskopindag
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	98,72%	96,92%	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	Diskopindag
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Diskopindag
Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab							
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Diskopindag
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Diskopindag

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2023

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan Diskopindag yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Diskopindag

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi aktif	Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar	1. Masih banyaknya koperasi tidak aktif (tidak melaksanakan RAT) sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif lagi 2. Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan secara

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			menyeluruh sesuai dengan aspirasi anggota
2	Masih minimnya usaha mikro yang berlegalitas dan berkembang	Kualitas peningkatan usaha mikro belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha mikro masih banyak yang mengurus perizinan usahanya 2. Pelaku usaha mikro masih belum sepenuhnya menguasai manajemen usaha dan pemasaran
3	Masih terbatasnya akses permodalan bagi KUM	Banyak pelaku K-UM yang belum memenuhi prinsip dasar pemberian kredit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan manajemen KSP USP masih belum optimal 2. Pada umumnya koperasi dan usaha mikro masih belum memanfaatkan sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non bank (KUR, DAGULIR, LPDB) 3. Lemahnya ketercukupan perizinan yang dipunyai oleh pelaku usaha mikro 4. Sanksi hukum tidak tegas dan tidak jelas terhadap koperasi yang secara fakta di lapangan tidak melakukan kegiatan usaha
4	Masih rendahnya produk yang berhasil dalam penetrasi pasar baik lokal atau pasar global	Belum optimalnya jaringan pemasaran dan kemitraan serta sarana promosi Belum optimalnya pelayanan perlindungan konsumen dan rendahnya jumlah pedagang tertib ukur	<p>Kurangnya pembinaan usaha dan promosi perdagangan secara kreatif dan inovatif dan melalui digital pemasaran</p> <p>Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas di bidang metrologi legal dan regulasi yang belum memadai.</p> <p>Faktor Eksternal: Globalisasi perdagangan mengakibatkan derasnya produk impor atau dari luar daerah</p>
2.	Persentase pasar kabupaten dalam kondisi baik/bersih masih rendah	Masih banyak sarana-prasarana pasar kabupaten yang belum dibangun/direhabilitasi/direvitalisasi	<p>Faktor Internal: Kurangnya koordinasi dan pengendalian di lingkup bidang Diskopindag dalam rangka mengawal capaian kinerja pelayanan pasar. Serta terbatasnya dukungan dana APBD</p> <p>Faktor Eksternal: -</p>
3.	Persentase pertumbuhan industri formal masih rendah	Pembinaan dan pengembangan IKM masih belum optimal	<p>Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Diskopindag dalam melaksanakan fungsi pengembangan IKM, Kurangnya pengetahuan SDM di bidang IPTEK sistem produksi</p> <p>Faktor Eksternal:</p>

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			-

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2022

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Diskopindag yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2019-204 sebagaimana berikut:



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Diskopindag mendukung pada pencapaian misi 2 yaitu **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Diskopindag yaitu Optimalisasi penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah urusan koperasi dan usaha mikro serta urusan perindustrian dan perdagangan. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Diskopindag yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah urusan koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin berkurangnya koperasi aktif 2. Kualitas peningkatan usaha mikro belum optimal 3. Kurangnya permodalan UKM 4. Kualitas produk yang belum memenuhi kebutuhan pasar 5. Pertumbuhan industri kecil perlu ditingkatkan 6. Kurangnya kualitas produksi sektor indutri kecil 7. Pengembangan sarana promosi perdagangan masih terbatas 8. Penyediaan sarana prasarana perdagangan belum terpenuhi secara optimal 9. Pelaksanaan tera ulang sebagai sumber pendapatan daerah tidak maksimal karena kurangnya sarana dan prsarana serta sumber daya manusia belum tersedia 10. Volume usaha perdagangan sektor agribisnis perlu ditingkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Derasnya arus globalisasi produk luar daerah yang masuk ke Sampang 2 Keterbatasan SDM pada Diskopindag dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan kementerian dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Diskopindag secara optimal 2 Tingginya jumlah produk IKM yang bervariasi yang dapat dipromosikan 3 Banyaknya jumlah IKM di Kab. Sampang yang membutuhkan pembinaan di bidang IPTEK 4 Perkembangan iptek sistem produksi dan teknologi informasi

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2023

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Perindustrian serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Diskopindag Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian RI dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian :	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa 2. Meningkatkan Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional 3. Meningkatkan Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor 4. Menurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif)	1. Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan, Standarisasi dan HKI 2. Meningkatkan Net Ekspor Non Migas Perdagangan Luar Negeri. 3. Meningkatkan Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri 4. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1. Semakin berkurangnya koperasi aktif 2. Kualitas peningkatan usaha mikro belum optimal 3. Kurangnya permodalan KUM 4. Kualitas produk yang belum memenuhi kebutuhan pasar 5. Masih rendahnya penetrasi produk terhadap pasar global 6. Minimnya sarana promosi dan pemasaran produk lokal 7. Pelaksanaan tera masih belum optimal karena kurangnya SDM dan sarana prasarana metrologi 8. Penyediaan sarana prasarana perdagangan belum terpenuhi secara optimal 9. Pertumbuhan industri formal masih rendah 10. Rendahnya produk IKM yang memiliki sertifikat dan standarisasi industri	1. Derasnya arus globalisasi produk luar daerah yang masuk ke Sampang 2. Keterbatasan SDM pada Diskopindag dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Diskopindag secara ideal 2. Tingginya jumlah produk IKM yang bervariasi yang dapat dipromosikan 3. Banyaknya jumlah IKM di Kab. Sampang yang membutuhkan pembinaan di bidang IPTEK 4. Perkembangan iptek sistem produksi dan teknologi informasi

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2023

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang. Namun demikian dalam rangka mendukung terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang

Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Diskopindag yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Diskopindag	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan/penegakan visi dan misi kepala daerah dalam kerangka pencapaian TPB;	1. Masih rendahnya daya saing	1 Kurangnya koordinasi di masing-masing lingkup Bidang Diskopindag	Regulasi tentang KLHS
2.	Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kabupaten Sampang yang berkelanjutan;	2. Persentase pasar kabupaten dalam kondisi baik/bersih masih rendah	2 Keterbatasan SDM pada Diskopindag dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	
3.	Evaluasi hasil capaian target (dan indikator) TPB secara berkala sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sampang demi percepatan pemenuhan tujuan tersebut	3. Persentase pertumbuhan industri formal masih rendah		

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2023

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

Koperasi dan Usaha Mikro :

- a. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UM
- b. Pertumbuhan usaha mikro berlegalitas dan berkembang
- c. Akses permodalan yang mendukung

Perindustrian :

- a. Peingkatan jumlah IKM yang berlegalitas

- b. Standarisasi produk IKM (sertifikasi halal, SNI, HACCP, ISO, BPOM)
- c. Peningkatan daya saing produk (desain, packaging) dan HKI
- d. Pengembangan industri kreatif

Perdagangan :

- a. Perluasan akses pemasaran dan sarana promosi produk UM dan IKM
- b. Pengembangan kemitraan dengan retail, marketplace dan platform lainnya
- c. Optimalisasi metrologi legal (tera/tera ulang)
- d. Peningkatan kualitas sarana prasarana distribusi perdagangan (pasar) dan pengelolaannya

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Diskopindag Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro “** dan sasaran **“Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”**, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Diskopindag dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Diskopindag Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskopindag Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan :										
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan Dalam Negeri *dalam milyar rupiah*	10,94	12,01	12,42	13,00	13,11	13,41	13,93	13,93
Sasaran :										
1	Meningkatnya Volume Perdagangan	Volume usaha perdagangan *dalam milyar rupiah*	853,70	878,38	873,85	875,90	884,10	892,90	902,80	902,80
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Formal	Persentase Pertumbuhan Industri Formal	3,15	2,75	2,97	3,17	2,80	4,73	4,89	4,89
3	Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UM Mandiri	Persentase Koperasi Sehat	N/A	48,16	52,70	46,98	51,06	51,39	52,05	52,05
		Persentase Pertumbuhan UM Mandiri	2,58	2,76	3,18	3,42	3,48	17,09	17,32	17,32

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2023

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

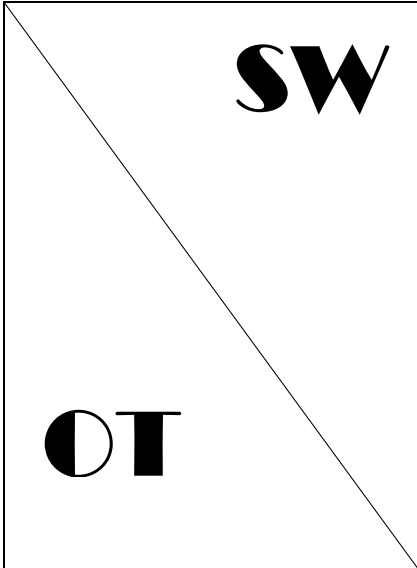
Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Diskopindag haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Diskopindag Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2** yakni **“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan usaha mikro “** dan sasaran **“Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”**

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif						
T.2	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	IT.3	Pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sentra usaha/produk ekonomi lokal • Meningkatkan kontribusi perdagangan, industri, dan jasa • Meningkatkan kontribusi koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal • Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar tradisional dan perlindungan konsumen • Peningkatan dan perencanaan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi • Peningkatan Jasa unggulan daerah • Peningkatan Produktivitas koperasi, IKM dan Usaha Mikro 	DISKOPINDAG
S.9	Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	IS.10	Nilai PDRB			
S.11	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan Usaha Mikro	IS.16 IS.17	Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Mandiri			

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Diskopindag Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Diskopindag Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya alam yang melimpah dan belum dikelola secara maksimal ; 2. SDM yang ulet dan hard worker ; 3. Komoditas unggulan / andalan yang siap bersaing ; 4. Pangsa pasar yang menjanjikan 5. Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten terhadap pembinaan dan pengembangannya; 6. Masih terbukanya peluang investasi. 7. Berkembangnya industri kreatif yang berbasis kearifan lokal 	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Lemahnya permodalan pada masyarakat 2 Minimnya kreatifitas dalam menjalankan usaha 3 Infrastruktur yang kurang memadai 4 Kurangnya informasi bagi pelaku usaha 5 Budaya yang masih melekat di masyarakat/pola pikir masyarakat 6 Minimnya pelaku usaha yang mengikuti diklat.
<p><u>Peluang /Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung meningkat. 2 Kabupaten Sampang cukup aman untuk berinvestasi. 3 Potensi industri dan perdagangan di Kabupaten Sampang dominan. 4 Lembaga keuangan sudah menjamur di Kabupaten Sampang 		
<p><u>Ancaman /Threat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya koordinasi lintas OPD. 2. Adanya sebagian pedagang yang tidak melakukan tera ulang. 3. Membanjirnya produk luar masuk ke Kabupaten Sampang 4. Exploitasi SDA yang tidak terkendali sehingga berdampak daya dukung lingkungan menurun 5. Sulitnya mendapatkan 		

sertifikasi produk halal, SNI, dll		
------------------------------------	--	--

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2022

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Diskopindag Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel T-C.26
Strategi dan Arah Kebijakan Diskopindag Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi 3. Memperluas akses permodalan bagi koperasi dan usaha mikro 4. Menumbuhkan wirausaha baru dan usaha mikro yang berlegalitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan koperasi melalui bimtek koperasi, sosialisasi dan literasi kelembagaan koperasi. 2. Pelatihan bagi wirausaha baru potensial 3. Memberikan fasilitasi kemudahan akses permodalan bagu KUM melalui dana bergulir, fasilitasi kemitraan dengan lembaga keuangan 4. Meningkatkan kualitas pendampingan kepada wirausaha baru dan usaha mikro dan kemudahan akses legalitas NIB

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Meningkatnya Volume Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana promosi perdagangan produk unggulan daerah dan produk kerajinan kreatif 2. Meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan dan tersedianya sarana distribusi perdagangan yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana promosi perdagangan melalui pameran promosi produk unggulan dan mengembangkan promosi melalui digitalisasi pemasaran dan mengembangkan jaringan kemitraan dengan berbagai platform 2. Peningkatan sarana distribusi perdagangan dan kualitas pelayanan perdagangan dengan meningkatkan pelayanan pasar, kualitas manajemen pendapatan retribusi pasar dan sarana distribusi perdagangan lainnya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan industri formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fasilitasi pendampingan bagi IKM formal dan non formal untuk berlegalitas 2. Peningkatan kualitas produk industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pertumbuhan industri formal melalui meningkatkan pembinaan dan fasilitasi IKM ber NIB, izin usaha dan mengoptimalkan penyediaan informasi industri (SiINAS) 2. Pelatihan diversifikasi produk industri dan optimalisasi pendampingan standarisasi produk, HKI 3. Mengembangkan sentra-sentra industri produk unggulan serta pengembangan kawasan peruntukan industri 4. Meningkatkan produk industri yang berstandarisasi dengan pendampingan kurasi, rumah kemasan

Sumber : Diskopindag Kabupaten Sampang, 2022

Untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Diskopindag Kabupaten Sampang melakukan beberapa **inovasi** pelayanan yaitu :

1. ErPas (Elektronik Retribusi Pasar)

ErPas adalah pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Para pedagang untuk membayar retribusi pasar cukup dengan menggunakan kartu yang akan digesekkan pada mesin EDC. Setiap hari juru retribusi pasar bersama dengan petugas bank berkeliling ke lapak pedagang untuk menarik retribusi dengan menggunakan mesin EDC. Retribusi pasar yang telah dibayarkan oleh para pedagang akan langsung masuk secara real-time pada Sistem Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang.

Tujuan dan Manfaat :

- Transaksi secara elektronik akan meningkatkan kepercayaan pedagang bahwa retribusi yang telah dibayarkan langsung masuk ke rekening Pemerintah Kabupaten Sampang
- Dapat mengurangi kebocoran pembayaran retribusi dan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan retribusi pasar

2 GERMALELA (Gerai Smart IKM Margalela)

Bentuk inovasi ini adalah disediakannya sebuah ruang sebagai rumah produk, klinik standarisasi industri kreatif, ngopi edukasi dan co-working space untuk para IKM Sampang yang dibuka dari pagi hingga malam dibawah pengelolaan Paguyuban IKM S'mart dan manajemen pengelola gerai rumahkita.id. Gerai Smart IKM ini berfungsi sebagai pusat oleh-oleh khas Kabupaten Sampang yang merupakan murni hasil produksi dari IKM Sampang. Gerai Smart IKM ini akan aktif dipromosikan dan dibranding oleh tim dari rumahkita.id dan difasilitasi melalui Bidang Perindustrian Diskopindag Kab. Sampang.

Tujuan dan Manfaat :

- sebagai rumah produk bagi IKM
- sebagai klinik standarisasi industri kreatif
- sebagai tempat ngopi edukasi sebagai co-working space bagi IKM

3 SI-GARANG (Sistem Informasi Harga dan Stok Barang)

Bentuk inovasi ini adalah hasil pencacahan perkembangan harga dan stok barang dari bahan pokok dan barang penting lainnya yang dilakukan oleh petugas pencacah langsung dimasukkan/dikirim ke Aplikasi Si-GARANG, selanjutnya secara otomatis memproses sehingga setiap harinya akan ter-update haraga rata-rata dari masing-masing bahan pokok dan barang penting lainnya melalui persetujuan Kepala Dinas terlebih dahulu.

Tujuan dan Manfaat :

Bagi Masyarakat :

- masyarakat mendapatkan informasi harga pasar secara terkini setiap harinya dan dapat mengetahui data detail stok ketersediaan komoditas di pasar.

Bagi Pemerintah Daerah :

- pemerintah daerah dapat mengetahui harga dan ketersediaan stok dan barang penting lainnya secara real-time melalui smartphone, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengatur kebijakan dan melakukan evaluasi untuk setiap pasar yang dikelola.

4 SIP-6 IKM SAMPANG (Sistem Informasi Pelayanan Penyuluhan, Pendampingan, Pengembangan Produk & Peningkatan Industri Kecil Menengah Kab. Sampang)

Bentuk inovasi ini adalah Sebuah sistem informasi yang dibangun berbasis Android untuk memberikan pelayanan prima bagi pelaku-pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Sampang. Para IKM dapat menggunakan SIP-6 sebagai platform kegiatan jual beli mereka.

Maksud dan Tujuan :

Memberikan layanan untuk IKM binaan yang telah terdaftar untuk meningkatkan usahanya, memberikan informasi kegiatan yang berhubungan dengan IKM, data fasilitasi IKM, melaporkan omset produksi harian IKM dan mempromosikan produk IKM

5 Elongah Artis (penolong usaha agar tidak kritis)

DISKOPINDAG melalui bidang Koperasi membuat sebuah inovasi untuk memfasilitasi penyertaan modal daerah bernama 5 Elongah Artis (penolong usaha agar tidak kritis). Dana Bergulir merupakan Pinjaman/ atau Pembiayaan yang berasal dari penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Sampang untuk Koperasi dan Usaha Mikro yang disalurkan/digulirkan dalam bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Diskopindag selama 2019-204 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Diskopindag. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Diskopindag Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
DISKUMNAKER																					
1. Meningkatkan kualitas koperasi dan kuantitas usaha mikro				1. Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	10,28	11,02		11,45		11,64		11,66		12,09		12,25		12,25		-	
				2. Persentase pertumbuhan UM Mandiri	2,58	2,76		3,18		3,32		3,44		3,55		3,60		3,60		-	
	1. Meningkatkan Koperasi aktif dan UM Mandiri			1. Persentase koperasi aktif bersertifikat	29,37	47,06		50,90		51,97		53,02		53,90		55,12		55,12		-	
				2. Persentase Peningkatan SHU	4,56	4,79		5,26		5,05		5,07		5,15		5,27		5,27		-	
				3. Persentase Pertumbuhan usaha mikro	0,92	1,41		1,35		1,15		1,22		1,28		1,33		1,33		-	
2. Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja				1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,48	2,81		3,35		2,30		2,26		2,23		2,21		2,21		-	
	1. Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan			1. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	94,66	95,73		97,15		95,13		95,26		95,39		95,52		95,52		-	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100		100		552,361,673.00								0		-	
			Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Surat yang dikirim	751	982	330,185,473.00	750		407,551,338.00								0		-	
				Pembayaran tagihan listrik, telepon dan air	12	12		12										0		-	
				Jumlah perpanjangan kendaraan roda 4 dan roda 2	34	31		30										0		-	
				Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22	24												0		-	
				Jumlah Tenaga Honorer Daerah	1	1												0		-	
				Jumlah Cleaning Service		4		4										0		-	
				Jumlah Security/Satpam		6		6										0		-	
				Jumlah Tukang Kebun		2		2										0		-	
				Jumlah Pemenuhan Jasa Tim Pengelola Keuangan				12										0		-	
				Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis,				12										0		-	
				Jumlah bahan bacaan yang disediakan;				730										0		-	
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat;				424										0		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu ;				10										0	-		
				Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan;				30										0	-		
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu ;				10										0	-		
			Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	jumlah Jenis Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	39	40	107,931,600.00	35	78,991,325.00									0	-		
				Jumlah barang yang dicetak dan Penggandaan	16 30065	12 50065		8 22741										0	-		
				jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	13		9										0	-		
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3	8		7										0	-		
				jumlah bahan bacaan surat kabar	12	12		12										0	-		
				Jumlah Dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (SAKIP SKPD)	731	660		0										0	-		
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman tamu	45	28		0										0	-		
				Jumlah alat kebersihan yang disediakan				19										0	-		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah PNS yang mengikuti rapat koordinasi luar daerah (Rakorda, Rakomas dan Konsultasi).	160	160	154,408,875.00	79	65,819,010.00									0	-		
				Jumlah PNS yang mengikuti rapat-rapat, konsultasi, koordinasi dalam lingkup kabupaten sampang	75	100		80										0	-		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	95	296,801,180.00	95	157,382,000.00									0	-		
			Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1	1	43,328,900.00	1	8,854,000.00									0	-		
			Pengadaan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas Roda 4 yang diservice	3	4	74,167,000.00	4	50,188,000.00									0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Kursi eselon IV		5	179,305,280.00		98,340,000.00									0	-		
				Jumlah Pengadaan lemari arsip kaca	2			1										0	-		
				Jumlah Pengadaan kursi tamu	1													0	-		
				Jumlah Pengadaan AC				2										0	-		
				Jumlah Pengadaan gordent/tirai jendela	1													0	-		
				Jumlah Pengadaan Komputer PC	1	4		2										0	-		
				Jumlah Pengadaan scanner				1										0	-		
				Jumlah Pengadaan mesin penghancur kertas				2										0	-		
				Jumlah Pengadaan Laptop	3	4												0	-		
				Jumlah Pengadaan Printer	3	4												0	-		
				Jumlah Pengadaan Hardisk Eksternal		1												0	-		
				Jumlah Pengadaan Syound		1												0	-		
				Jumlah Pengadaan Proyektor				2										0	-		
				Jumlah Pengadaan Megaphone				1										0	-		
				Jumlah Pengadaan Camera		1												0	-		
				Jumlah Pengadaan Handycam		1												0	-		
				umlah Pengadaan LCD Proyektor		1												0	-		
				Jumlah pemeliharaan Alat-Alat Kantor dan inventaris yang diservice	61	65		40										0	-		
				Jumlah Meubeler Kantor yang diservice	51	51		35										0	-		
																		0	-		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur		3	15,700,000.00	0	-									0	-		
			Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan	5	3	15,700,000.00	0										0	-		
																		0	-		
			Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		100	100	36,374,975.00	100	21,997,200.00									0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat	100	100	11,375,000.00		12,047,500.00									0	-		
				Jumlah Dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (SAKIP SKPD)	1	1		1										0	-		
				Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	2	2		2										0	-		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4	1	9,999,975.00	1	9,949,700.00									0	-		
				Jumlah Dokumen Penyusunan Renja, RKA-SKPD dan DPA SKPD	3	3		3										0	-		
																		0	-		
			Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Penyusunan Daftar Gaji		1	15,000,000.00	1	-									0	-		
				Jumlah Dokumen SKM		1		1										0	-		
				Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah (Pameran)		1		1										0	-		
				Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah (Pawai)		1		1										0	-		
																		0	-		
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		104.6728972													0	-		
			Pemetaan Koperasi di Kabupaten Sampang	Pendataan Koperasi dan Pengklafikasian Koperasi Aktif dan Tidak Aktif	446													0	-		
			Sosialisasi dan advokasi pengembangan koperasi	Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan Perkoperasian Kepada Koperasi Siswa	650													0	-		
			Penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana koperasi	Pembinaan Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi, serta Koperasi bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan	50													0	-		
			Pelatihan Pembukuan Akuntansi bagi Pengelola Koperasi	peserta pelatihan akuntansi bagi pengelola dan anggota Koperasi	50													0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	1. Pelatihan Penyusunan Laporan RAT	60													0	-		
				2. Bintek Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	50													0	-		
				3. Workshop Peningkatan Kualitas Koperasi Wanita	132													0	-		
				4. Pelaksanaan kegiatan Hari Koperasi Tahun 2018	1													0	-		
				5. Rapat Koordinasi bagi Pengelola Koperasi Cabang	15													0	-		
																		0	-		
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	UMK aktif binaan	29969													0	-		
				UMK /Kelompok yang terfasilitasi legalitasnya	84													0	-		
				Tabloid Koperasi dan UKM News 12 kl edisi	12													0	-		
																		0	-		
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peningkatan Wirausaha Baru	272													0	-		
			Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro dan Koperasi yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Olahan Minuman Hasil Pertanian Jambu Air, Bebek Songkem, Petis dan Mente	140													0	-		
				Terlaksananya Kewirausahaan melalui Pembinaan dan Pelatihan terhadap Usaha Teknik Pengelolaan Olahan Minuman Hasil Pertanian Jambu Air, Bebek Songkem, Petis dan Mente	12													0	-		
				15 TKB (12 bln)	15													0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Peningkatan usaha ekonomi produktif dan kreatif bagi KUMKM	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Anggota Koperasi	3													0	-		
				Jumlah Peserta Produksi Usaha Koperasi di Bidang Usaha Pertanian, Perikanan, Peternakan, Industri dan Perdagangan	40													0	-		
				Jumlah Usaha Koperasi yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Kerajinan Batik	20													0	-		
				Studi Banding terhadap Pengurus dan Anggota Koperasi tentang Teknik Membantik yang ada di di Luar Madura	35													0	-		
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM	Presentase K-UM yg mendapat fasilitas pembiayaan	49.39													0	-		
				Jumlah kemitraan antara Koperasi dan BUMN/D	57													0	-		
				Jumlah kemitraan antara UMKM dan BUMND	32													0	-		
			Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi koperasi dan UMKM	Terealisasi Rakor Pokjanis, dan Tenaga Fasilitator Kredit Dana Bergilir 12 kali rakor Pokjanis, 48 kali survey KUMKM, 96 Kali survey Koperasi dan UM	6													0	-		
				Penagihan, fasiitator	13													0	-		
					65													0	-		
					8													0	-		
					12													0	-		
			Peningkatan kapasitas pengelolaan KSP/USP Koperasi	Jumlah pendidikan Akuntansi Lanjutan Simpan Pinjam bagi Koperasi	40													0	-		
				Jumlah pendidikan Pengelolaan KSP/USP Koperasi Berbasis Kompetensi Pola Konvensional dan Syariah bagi Koperasi	80													0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyelenggaraan promosi produk koperasi dan usaha mikro	Jumlah KUMKM yang mengikuti Pameran produk unggulan 2 Lokal, 4 Regional, 3 Nasional	11													0	-		
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi	56.28970775													0	-		
			Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga Kerja	Sosialisasi Bursa Tenaga Kerja 13 kec /650 orang	13 650													0	-		
			Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Wirausaha yang Mengikuti Pelatihan	80													0	-		
				Jumlah Kelompok Usaha yang mengikuti Pelatihan (PIK)	4													0	-		
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah lembaga ketenaga kerjaan yang aktif	16													0	-		
			Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perseelisihan hubungan industrial	Metode Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial	5													0	-		
			Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Pelaksanaan pembinaan norma kerja terhadap fungsi dan tugasnya 150 perusahaan	150													0	-		
			Penyusunan upah minimum kabupaten	Penyusunan UMK dan Sosialisasi UMK 3 Kec.	3													0	-		
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang diberangkatkan	3													0	-		
			Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran	Pemindahan Masyarakat Keluar daerah	3													0	-		
																		0	-		
			Program Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja	a. Presentase pencari kerja yang terfasilitasi			419,997,035.00											0	-		
				b. Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun		1.33												0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah Peserta Palatihan Usaha Ekonomi Produktif		120	164,283,325.00											0	-		
			Fasilitasi hubungan industrial	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan		3	67,507,110.00	0	33,890,000.00									0	-		
				Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		150		75										0	-		
				Jumlah Kecamatan yang didata dan disurvei (KHL)		14		0										0	-		
			Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Peserta Sosialisasi penyebaran informasi bursa tenaga kerja		600	188,206,600.00	50	89,767,645.00									0	-		
				Job Fair		1												0	-		
				Jumlah Perpindahan Masyarakat ke daerah Transmigrasi		7												0	-		
				Jumlah Pendampingan PMI bermasalah				35										0	-		
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pencari kerja yang dilatih di BLK		97.5	704,502,240.00	46.33%	979,924,056.00									0	-		
			Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	228	117	526,009,480.00	100	559,902,056.00									0	-		
			Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana kelembagaan pelatihan	Jumlah Peralatan dan asrama untuk pelatihan Siswa	14	4	178,492,760.00	4	275,270,000.00									0	-		
			Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/ kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang mendapatkan Bantuan Sarana Produksi Sesuai dengan Keahlian Yang di dapatkan	4	2	-	1	144,752,000.00									0	-		
			Program Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT		81	466,597,516.00	60.29%	703,827,317.00									0	-		
				Persentase UM yang berlegalitas		0.3												0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tataaksana Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi		52	194,499,306.00	28	96,369,740.00									0	-		
			Pembinaan dan pengawasan koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Koperasi		280	194,734,710.00	0	226,030,210.00									0	-		
				Jumlah Rapat Movev dan Koordinasi dengan Pengurus Koperasi		80												0	-		
				Jumlah Rangkaian Kegiatan Hari Koperasi		1												0	-		
				Jumlah Pendampingan pada Koperasi untuk berkinerja baik;				52										0	-		
				Jumlah Pendataan Usaha Mikro;				400										0	-		
				Jumlah Peserta Upacara Hari Koperasi.				700										0	-		
			Advokasi Koperasi dan Usaha Mikro	jumlah Koperasi yang di Revitalisasi		20	77,363,500.00											0	-		
				jumlah Peserta Penyuluhan Perkoperasian Kepada Kelompok		75												0	-		
			Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	Jumlah pelatihan perkoperasian				150	381,427,367.00									0	-		
				Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan Vocational				100										0	-		
																		0	-		
			Program Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase KUM yang produknya terstandarisasi		1.63	962,797,028.00	2.1	700,692,176.00									0	-		
				Persentase Akses permodalan bagi KUM		96.67		57.67										0	-		
			Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif bagi KUM	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Produksi Bagi Koperasi dan		40	334,236,000.00	20	229,773,000.00									0	-		
				Pelatihan Pengelolaan Olahan Minuman Hasil Pertanian Jambu Air,														0	-		
				Bebek Songkem, Petis dan Mente														0	-		
				Jumlah Peserta pelatihan kewirausahaan		60		20										0	-		
				Jumlah Peserta Studi Banding		40												0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM (8 KI Rakor Pokjani s, 10 KI Survey KUMK M, 50 Kali Penagihan, 20 kali pendampingan dan 4 Tenaga FS)		8	178,383,100.00	8	170,797,676.00									0	-		
				Jumlah Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM (Rakor);		10		4										0	-		
				Fasilitasi Akses Pembiayaan KUM melalui BUMN/S (unit);		50		4										0	-		
				Jumlah survey, pendampingan dan appraisal;		10		5										0	-		
				Jumlah Rakor pokjanis, SHAT,SIKP,WP;		4		15										0	-		
				Jumlah penagihan;				42										0	-		
			Pengembangan sarana pemasaran produk koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Penerbitan Tabloid KUMNAKER NEWS bagi Anggota Koperasi		4800	450,177,928.00	12	300,121,500.00									0	-		
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Koperasi dan Usaha Mikro		7												0	-		
				Jumlah Event pameran Regional;				1										0	-		
				Jumlah Event pameran Nasional;				2										0	-		
																		0	-		
DISPERDAGRIN																					
				1. Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif		7,54		8,28		9,02		9,76		10,5		11,24		11,98		-	
				2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri		4,99		5,14		5,29		5,44		5,58		5,73		5,88		-	
			1. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan	1. Nilai Ekspor Perdagangan		10,94		12,01		12,42		15,5		17,00		19,4		22,3		-	
				2. Volume Usaha Perdagangan		853,70		878,38		873,85		905,9		924,1		942,6		961,4		-	
			2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Formal	1. Persentase Pertumbuhan Industri Formal		3,15		2,75		2,97		3,17		2,8		3,27		3,16		-	
			3. Meningkatnya Perdagangan Sektor Agribisnis	1. Volume Usaha Perdagangan Sektor Agribisnis						376,37		322		340		359		381		-	
																		0	-		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100		87.7		1,211,246,042.00		100		1,143,220,695.00				0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang terkirim	1657	1253	963,722,812.00	1250										0	-		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	27													0	-		
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	a) Perpanjangan STNK dan PKB mobil dinas	2			5										0	-		
				b) Perpanjangan STNK dan PKB roda 2 dan 3	31			37											0	-	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	a) Peralatan dan bahan kebersihan	26			26										0	-		
				b) Upah penjaga malam/waker	2			2										0	-		
			Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	35													0	-		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	a) Barang cetakan dan penggandaan	7													0	-		
				b) Penggandaan dokumen	2000													0	-		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik	7													0	-		
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Spanduk, umbul-umbul, bendera merah putih	3													0	-		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar	3													0	-		
			Penyediaan makanan dan minuman	a) Makanan dan minuman yang tersedia	564													0	-		
				b) Mamin tamu yang tersedia	20													0	-		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	a) BBM rapat yang terlaksana	1030			1145	76,554,300.00									0	-		
				b) Rapat yang terlaksana	40			50										0	-		
			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung/honor daerah	4			4										0	-		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat yang terlaksana	14													0	-		
			Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		50	128,013,580.00	0	39,798,960.00									0	-		
				Jumlah ATK yang sudah dipakai				40										0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah barang cetak dan penggandaan yang sudah dipakai				10 22.000										0	-		
				Jumlah komponen instalasi penerangan bangunan kantor yang sudah dipasang				15										0	-		
				Jumlah berlangganan surat kabar harian yang sudah dibayar				3										0	-		
				Jumlah mamin rapat dan tamu yang sudah habis dipakai				536 36										0	-		
																		0	-		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat luar daerah yang diikuti		89	119,509,650.00	74	76,554,300.00									0	-		
				Jumlah rapat dalam daerah yang sudah terlaksana		14		50										0	-		
				Jumlah BBM untuk rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah yang sudah terpakai				1145										0	-		
																		0	-		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100		180,289,905.00											0	-		
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang akan dibangun	1													0	-		
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	2													0	-		
			Pengadaan komputer	Jumlah laptop dan printer yang tersedia	8													0	-		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3													0	-		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dinas yang terpelihara	4													0	-		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan yang diservis	5													0	-		
			Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		3	50,941,630.00	3	53,897,750.00									0	-		
				Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi				0										0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia														0	-		
				a) Kendaraan Roda 2		36	99,368,275.00	37	43,628,650.00									0	-		
				b) Kendaraan Roda 3		15		25										0	-		
				c) Kendaraan Roda 4		6		5										0	-		
				Jumlah mobil dinas yang rutin dilakukan perawatan				5										0	-		
			Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laptop dan printer yang tersedia		10	29,980,000.00		2,375,000.00									0	-		
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				5										0	-		
				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis				10										0	-		
																		0	-		
																		0	-		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100		33,019,000.00											0	-		
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah diklat yang diikuti	4													0	-		
			Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah diklat yang diikuti	2		33,019,000.00	0	-									0	-		
																		0	-		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100													0	-		
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja (LPPD, LKPJ, LAKIP)	3													0	-		
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	2													0	-		
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1													0	-		
			Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA, DPA dan Renja yang tersusun	3													0	-		
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan				5	9,990,000.00									0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan dokumen Perencanaan dan Penganggaran				3	10,000,000.00									0	-		
			Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah laporan dokumen IKM Pelayanan Industri dan Perdagangan				2										0	-		
			Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu			100	44,935,000.00										0	-		
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja (LPPD, LKPJ, LAKIP)				3	14,995,000.00									0	-		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun				2	14,940,000.00									0	-		
			Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1	15,000,000.00									0	-		
																		0	-		
																		0	-		
			URUSAN PERDAGANGAN															0	-		
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Intensitas survey harga bahan pokok	12													0	-		
			Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Laporan Informasi Harga dan Kebutuhan Persediaan 9 (sembilan) Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya	12													0	-		
			Operasional dan pengembangan kemetropolitan daerah	Jumlah pengawasan (BDKT, kadaluarsa, SNI, UTTP dan peredaran barang dan jasa)	42													0	-		
			Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Promosi perdagangan yang diikuti	6													0	-		
			Penyelenggaraan Promosi Perdagangan Nasional/ Internasional	a) Pameran promosi produk unggulan daerah yang diikuti	6													0	-		
				b) Jenis komoditi yang dipamerkan	4													0	-		
																		0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Persentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		89,29	2,027,801,510.00		684,012,912.00									0	-		
			Pembinaan Usaha Perdagangan, Promosi dan Pemasaran	a) Pameran promosi produk unggulan daerah yang diikuti		6	500,519,700.00	6	61,674,900.00									0	-		
				b) Jenis komoditi yang dipamerkan		4		5										0	-		
			Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Metrologian Legal	Jumlah Pedagang yang tertib ukur		14	1,427,586,810.00	14	111,261,500.00									0	-		
			Pengelolaan Informasi Perdagangan dan Penyaluran Barang dan Jasa	Ketersediaan sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya		12	99,695,000.00		87,468,500.00									0	-		
			Fasilitasi Dekranasda	Operasional Dekranasda				12	423,608,012.00									0	-		
																		0	-		
																		0	-		
			Program Pelayanan Perdagangan Daerah	Cakupan pasar kabupaten yang direhabilitasi	5													0	-		
			Pengembangan Pasar Hewan	Jumlah pasar hewan yang akan dibangun	1													0	-		
			Pengembangan Pasar tradisional dan polowijo	Jumlah pasar tradisional yang direhabilitasi	5													0	-		
			Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Pasar	Jumlah pasar yang terpelihara	4													0	-		
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi retribusi Daerah	a) Jumlah retribusi pasar	14													0	-		
				b) Penagihan pajak	14													0	-		
				c) Pendataan pajak	14													0	-		
				d) Monitoring pasar	12													0	-		
				e) Pemantauan pasar	25													0	-		
			Pengelolaan Lingkungan Pasar Sehat	Jumlah pasar yang dikelola kebersihannya	25													0	-		
																		0	-		
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Daerah	Persentase pasar Kabupaten dalam kondisi baik dan sehat		100	7,361,854,844.00		3,272,178,210.00									0	-		
			Pengembangan Pasar Tradisional	Jumlah pasar tradisional yang dibangun		1	5,431,424,519.00		1,114,741,160.00									0	-		
				Jumlah pasar tradisional polowijo dan pasar hewan yang sudah dibangun/ revitalisasi				2										0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pengelolaan Pendapatan Pasar	a) Jumlah retribusi pasar		25	555,229,325.00	25	636,860,450.00									0	-		
				b) Penagihan pajak		25		25										0	-		
				c) Pendataan pajak		25		25										0	-		
			Peningkatan Pengawasan Pasar	Jumlah pasar yang dikelola kebersihannya		25	1,375,201,000.00	25	1,520,576,600.00									0	-		
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pasar kabupaten yang dibangun/direhab/dipelihara		100	1,116,297,000.00											0	-		
			Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar	Jumlah pasar yang terpelihara sarana dan prasarananya		2	998,440,000.00											0	-		
			Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih	Jumlah pasar yang terpelihara sarana dan prasarananya		2	117,857,000.00											0	-		
																		0	-		
			Program Pembinaan dan Operasional Dekranasda	Jumlah kegiatan Dekranasda yang dilaksanakan	2													0	-		
			Pembinaan dan Operasional Dekranasda	Pameran Dekranasda yang diikuti	2													0	-		
																		0	-		
			URUSAN PERINDUSTRIAN															0	-		
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan IKM yang dapat dikembangkan	175													0	-		
			Peningkatan Mutu Industri	a) Pelatihan Sosialisasi Desain Motif Batik	1													0	-		
				b) Lomba Desain Motif Batik khas Sampang	1													0	-		
			Fasilitasi kerjasama kemitraan industri dengan swasta	Jumlah fasilitasi kemitraan yang dilaksanakan	2													0	-		
			Pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan industri	a) Jumlah pelatihan inovasi olahan IKM agro	2													0	-		
				b) jumlah pelatihan peningkatan mutu IKM agro	2													0	-		
																		0	-		
			Program Penataan dan Pengembangan Industri	Persentase IKM yang memiliki kemampuan standarisasi mutu Industri		100	1,215,604,746.00		604,468,050.00									0	-		
			Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM potensial yang difasilitasi kemitraan industri		30	706,541,496.00											0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah kelompok yang mengikuti inkubasi industri kreatif		2												0	-		
				Jumlah IKM potensial yang difasilitasi kemitraan industri dan field trip				35	359,186,550.00									0	-		
				Jumlah kelompok yang mengikuti inkubasi wirausaha industri agro				3										0	-		
				Jumlah short course pengembangan WUB yang dilaksanakan				6										0	-		
				Pengembangan sentra produk OVOP unggulan ringkel				3										0	-		
				Pengembangan produk OVOP kerajinan kulit				1										0	-		
				Pengembangan produk OVOP olahan krupuk ikan sreseh				20										0	-		
																		0	-		
																		0	-		
			Peningkatan Teknologi, Desain dan Standarisasi Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas standarisasi produk		70	478,928,750.00											0	-		
				Jumlah IKM yang mendapat fasilitas standarisasi produk IKM (sertifikasi HALAL, pendaftaran merek HKI, nutrition fact, SNI, MD, barcode)				150	209,105,550.00									0	-		
				Bimtek Standarisasi yang terlaksana		1		2										0	-		
				Pengadaan perlengkapan Galery IKM MART SAMPANG		1												0	-		
				Sosialisasi peningkatan sistem aplikasi android pelayanan IKM		2												0	-		
				Even Pekan Inno Crea IKM Sampang Hebat				1										0	-		
				Klinik desain pengemasan IKM				1										0	-		
				Pengembangan Layanan klinik berbasis android dan market place IKM				1										0	-		
				Pengembangan desain produk kerajinan dan batik				1										0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah fasilitas desain redesain kemasan dan label produk				40										0	-		
			Pembinaan dan Pengawasan Industri	a) Jumlah pelatihan inovasi olahan IKM agro		2	30,134,500.00											0	-		
				b) jumlah pelatihan peningkatan mutu IKM agro		2												0	-		
				Intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan dan monitoring IKM				3	36,175,950.00									0	-		
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan penguasaan teknologi oleh industri kecil	133													0	-		
			Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan pewarnaan batik alam	2													0	-		
			Pengembangan dan Pelayanan teknologi Industri	a) Jumlah Pendamping pelayanan teknologi IKM	5													0	-		
				b) Jumlah Aplikasi e Sampang IKM potensial by android	1													0	-		
				c) Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi updating data IKM berbasis aplikasi dan promosi online	35													0	-		
			Perluasan penerapan sistem produk industri manufaktur	a) Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi standarisasi mutu	60													0	-		
				b) Jumlah IKM yang mendapat fasilitas standarisasi produk IKM	36													0	-		
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Cakupan pemerdayaan industri kecil di daerah penghasil tembakau	26													0	-		
				Persentase IKM yang memiliki kemampuan teknologi industri		100	124,017,000.00											0	-		
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat	a) Jumlah bantuan hibah mesin pengolah tanah liat genteng	26													0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				b) Jumlah bantuan hibah mesin konveksi, pengolahan bandeng, mebel, peralatan batik cap	17													0	-		
				a) Jumlah bantuan hibah mesin pengolahan tanah liat genteng		15	124,017,000.00											0	-		
				b) Jumlah bantuan hibah mesin konveksi, pengolahan bandeng, mebel, peralatan batik cap		1												0	-		
			Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat	c) Jumlah sosialisasi penggunaan mesin pengolahan tanah liat	1			0	-									0	-		
																		0	-		
DISKOPINDAG																		0	-		
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan				Nilai Ekspor Perdagangan Dalam Negeri	10,94	12,10		13,90		13,00		13,11		13,41		13,93		13,93	-		
	Meningkatnya Volume Perdagangan			Volume Perdagangan	853,70	870,80		888,20		875,90		884,10		892,90		902,80		902,80	-		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															0	-		
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota															0	-		
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Pembinaan Administrasi dan laporan pertanggungjawaban						25	158,485,098.00	25	174,333,607.80					0	-		
				2. Jumlah Pendampingan pada Koperasi berkinerja baik						25		25						0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota)*									20	191.766.968	20	210.943.665.00	20	210.943.665.00			
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Koperasi yang dibina						25	85,207,700.00	25	93,728,470.00					0	-		
				2. Jumlah peserta kegiatan peningkatan Akuntabilitas Koperasi						100		100						0	-		
				3. Jumlah peserta Penyuluhan Perkoperasian pada kelompok						100		100						0	-		
				4. Jumlah Rapat Monev dan Koordinasi dengan pengurus koperasi						20		20						0	-		
				Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja)*										20	103,101,317.00	20	113,411,448.70	20	113,411,448.70		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI															0	-		
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota															0	-		
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian						100	459,180,503.00	100	505,098,553.30					0	-		
				2. Jumlah UM yang mengikuti pelatihan Vocational						100		100						0	-		
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian)*										100	555,608,408.63	100	611,169,249.49	100	611,169,249.49		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															0	-		
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan															0	-		
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Wirasaha Baru						1400	82,763,164.00	1400	91,039,480.40					0	-		
				Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota *)										1500	40,985,000.00	1500	45,000,000.00	1500	45,000,000.00		
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro *)	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro *)										30	50,785,000.00	30	70,000,000.00	30	70,000,000.00		
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UM yang difasilitasi perizinannya						200	52,209,594.00	200	57,430,553.40					0	-		
				Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan *)										200	63,173,608.74	200	69,490,969.61	200	69,490,969.61		
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro *)	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro *)										240	175,850,000.00	240	180,000,000.00	240	180,000,000.00		
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1. Jumlah koperasi yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan ;						5	199,833,596.00	5	219,816,955.60					0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				2. Jumlah UM yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan						15	-	15						0	-		
				Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro)*									30	241,798,651.16	30	265,978,516.28	30	265,978,516.28			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan)*	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan)*									20	60,750,000.00	20	75,000,000.00	20	75,000,000.00			
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															0	-		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil															0	-		
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1. Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan ;						40	344,625,556.00	40	379,088,111.60					0	-		
				2. Jumlah peserta pelatihan peningkatan produksi						60		60						0	-		
				Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi)*									230	147,375,000.00	230	155,000,000.00	230	155,000,000.00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu														0	-		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun					3	4,000,000.00	3	4,400,000.00						0	-		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*)									3	4,840,000.00	3	5,324,000.00	3	5,324,000.00			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun					1	3,999,988.00	1	4,399,986.80						0	-		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*)									1	4,839,985.48	1	5,323,984.03	1	5,323,984.03			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun					1	3,999,988.00	1	4,399,986.80						0	-		
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*)									1	4,839,985.48	1	5,323,984.03	1	5,323,984.03			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun					1	3,999,988.00	1	4,399,986.80						0	-		
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*)									1	4,839,985.48	1	5,323,984.03	1	5,323,984.03			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun					1	3,999,988.00	1	4,399,986.80						0	-		
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*)									1	4,839,985.48	1	5,323,984.03	1	5,323,984.03			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, SAKIP LKJIP Perangkat Daerah yang disusun					4	3,999,875.00	4	4,399,862.50						0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*)									4	4,839,848.75	4	5,323,833.63	4	5,323,833.63			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu													0	-			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN selama 1 tahun					144	12,815,175,210.00	144	14,096,692,731.00					0	-			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*)									144	#####	144	17,056,998,204.51	144	17,056,998,204.51			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan					50	34,836,623.00	50	38,320,285.30	50	42,152,313.83	50	46,367,545.21	50	46,367,545.21			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun					1	3,999,970.00	1	4,399,967.00					0	-			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*)									1	4,839,963.70	1	5,323,960.07	1	5,323,960.07			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD yang disusun					18	3,999,396.00	18	4,399,335.60					0	-			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD*)									2	4,839,269.16	2	5,323,196.08	2	5,323,196.08			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur													0	-			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat					15	18,885,000.00	15	20,773,500.00					0	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *)										5	52,850,850.00	5	55,135,935.00	5	55,135,935.00		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang-undangan														0	-		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan*)										100	300,000,000.00	100	400,000,000.00	100	400,000,000.00		
																		0	-		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran														0	-		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan						26	11,999,444.00	26	13,199,388.40					0	-		
				Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*)										26	14,519,327.24	26	15,971,259.96	26	15,971,259.96		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						26	45,844,132.00	26	50,428,545.20					0	-		
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan yang disediakan						13		13						0	-		
				Jumlah Spanduk, Bendera, Umbul-umbul yang disediakan						3		3						0	-		
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan *)										8	55,471,399.72	8	61,018,539.69	8	61,018,539.69		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor*)										50	45,881,000.00	50	60,000,000.00	50	60,000,000.00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan						12	21,999,390.00	12	24,199,329.00					0	-		
				Jumlah belanja penggandaan yang disediakan						6000		6000						0	-		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan *)										14	26,619,261.90	14	29,281,188.09	14	29,281,188.09		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan						3	3,600,000.00	3	3,960,000.00					0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*)									4	4,356,000.00	4	4,791,600.00	4	4,791,600.00			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu					750	14,997,500.00	750	16,497,250.00					0	-			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*)									12	18,146,975.00	12	19,961,672.50	12	19,961,672.50			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah					40	99,785,000.00	40	109,763,500.00					0	-			
				2. Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah					20		20						0	-			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*)									12	120,739,850.00	12	132,813,835.00	12	132,813,835.00			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik													0	-			
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan					0		0		0		0		0	-			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan					10	64,639,127.00	10	71,103,039.70					0	-			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan *)									10	78,213,343.67	10	86,034,678.04	10	86,034,678.04			
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun/direvitalisasi													0	-			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*)									1	3,000,000,000.00			0	-			
																	0	-			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran													0	-			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim					1250	2,992,000.00	1250	3,291,200.00					0	-			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*)									12	3,620,320.00	12	3,982,352.00	12	3,982,352.00			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, telepon yang dibayarkan					40	350,900,935.00	40	385,991,028.50					0	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*)									12	1,024,590,131.00	12	1,267,049,144.00	12	1,267,049,144.00			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penjaga Gudang					4	153,000,000.00	4	168,300,000.00					0	-			
				Jumlah Penjaga Malam Kantor					6		6						0	-			
				Jumlah Petugas Kebersihan Kantor					8		8						0	-			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*)									12	185,130,000.00	12	203,643,000.00	12	203,643,000.00			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik													0	-			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara					5	89,400,000.00	5	98,340,000.00					0	-			
				2. Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan					68		68						0	-			
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya*)									70	108,174,000.00	70	118,991,400.00	70	118,991,400.00			
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara					20	4,960,000.00	20	5,456,000.00	20	6,001,600.00	20	6,601,760.00	20	6,601,760.00			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara					20	9,800,000.00	20	10,780,000.00	20	11,858,000.00	20	13,043,800.00	20	13,043,800.00			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi					3	49,920,000.00	3	54,912,000.00	3	60,403,200.00	3	66,443,520.00	3	66,443,520.00			
			Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran													0	-			
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Jumlah dokumen SKM					1	15,980,000.00	1	17,578,000.00	1	19,335,800.00	1	21,269,380.00	1	21,269,380.00			
				2. Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah					2		2		2		2		2	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN															0	-		
			PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN															0	-		
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar kabupaten yang dibangun / direvitalisasi						2	402,099,066.00	2	442,308,972.60					0	-		
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan)*									3	2,512,467,216.00	3	2,700,000,000.00	3	2,700,000,000.00			
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang terpelihara Sarana Prasarannya						25	847,873,841.00	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan)*														0	-		
			PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA															0	-		
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Kabupaten yang Dikelola Kebersihannya						25	1,543,927,690.00	25	1,698,320,459.00					0	-		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan)*									12	1,868,152,504.90	12	2,054,967,755.39	12	2,054,967,755.39			
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Retribusi Pasar, Penagihan Retribusi Pasar Daerah, dan Pendataan Retribusi Pasar Daerah						25	545,932,820.00	25	600,526,102.00					0	-		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan)*									12	660,578,712.20	12	726,636,583.42	12	726,636,583.42			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING															0	-		
			MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN															0	-		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Perdagangan Sektor Agribisnis						12	107,509,828.00	12	118,260,810.80					0	-		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat)*											12	90,775,919.00	12	143,095,581.07	12	143,095,581.07		
			PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR															0	-		
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Informasi Harga Bahan Pokok dan Harga Sembilan Bahan Pokok serta Barang Penting Lainnya						12	75,021,421.00	12	82,523,563.10					0	-		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota)*											12	130,086,891.00	12	140,000,000.00	12	140,000,000.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN															0	-		
			PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN															0	-		
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan tera dan tera ulang						14	167,329,761.00	14	184,062,737.10					0	-		
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang)*										14	189,469,010.00	14	222,715,911.89	14	222,715,911.89		
			Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Peredaran Barang Jasa						14	6,570,000.00	14	7,227,000.00					0	-		
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina)*										14	20,949,700.00	14	8,744,670.00	14	8,744,670.00		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															0	-		
			PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															0	-		
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah pelaksanaan event promosi ;						2	496,541,559.00	2	546,195,714.90					0	-		
				2. Operasional Dekranasda						11		11						0	-		
				Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota)*										5	600,815,286.39	5	660,896,815.03	5	660,896,815.03		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jenis Komoditi yang akan dipamerkan ;						4	310,085,327.00	4	341,093,859.70					0	-		
				2. Jumlah Pameran Promosi Produk Unggulan Daerah ;						6		6						0	-		
				3. Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan						4		4						0	-		
				Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi)*										10	375,203,245.67	10	412,723,570.24	10	412,723,570.24		
																		0	-		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI															0	-		
			PENTOSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA															0	-		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan kebijakan						3	149,999,861.00	3	164,999,847.10					0	-		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri)*										3	181,499,831.81	3	199,649,814.99	3	199,649,814.99		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Even pekan INNO Crea IKM Sampang Hebat ;						1	239,347,677.00	1	263,282,444.70					0	-		
				2. Jumlah IKM potensial yang difasilitasi kemitraan industri dan field trip ;						30		30						0	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				3. Pengembangan desain produk kerajinan dan batik						1		1						0	-			
				4. Pengembangan produk OVOP kerajinan ;						2		2						0	-			
				5. Pengembangan sentra produk OVOP unggulan Batik Berlatar Ringkel						2		2						0	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri)*										3	289,610,689.17		3	290,000,000.00	3	290,000,000.00		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah Bimtek standarisasi ;						1	399,456,526.00	1	439,402,178.60					0	-			
				2. Pengembangan Klinik desain pengemasan IKM ;						1		1						0	-			
				3. Pengemb. Layanan klinik berbasis Android dan marketplace IKM ;						1		1						0	-			
				4. Jumlah IKM yg mendapat fasilitasi standarisasi produk IKM (sertifikasi HALAL, merk HKI, nutricion fact, SNI,MD, barcode						150		150	-					0	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri)*										1	483,342,396.46		1	531,676,636.11	1	531,676,636.11		
																		0	-			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Jumlah kelompok yang mengikuti inkubasi wira usaha industri;						8	3,418,120,326.00	8	3,759,932,358.60					0	-			
				2. jumlah short course inovasi produk pengembangan WUB industri						3		3						0	-			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat)*										8	4,135,925,594.46		8	4,549,518,153.91	8	4,549,518,153.91		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA															0	-		
			PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)															0	-		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi peraturan Industri dan pengawasan industri						3	21,508,890.00	3	23,659,779.00					0	-		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota)*											5	26,025,756.90	5	28,628,332.59	5	28,628,332.59		
			PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN															0	-		
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1. katalog IKM dan data IKM ;						1	87,408,881.00	1	96,149,769.10					0	-		
				2. Layanan IKM berbasis Android						1		1						0	-		

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Diskopindag Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2 “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”, serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan usaha mikro” dan sasaran “Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”. Indikator kinerja Diskopindag yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator kinerja Diskopindag yang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019 R	2020 R	2021	2022	2023	2024	
T.2 Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif									
IT.3	Pertumbuhan ekonomi	4,44	4,76	-0,11	3,75	4,51	5,01	5,25	5,25
S.9 Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif									
IS.10	Nilai PDRB	11,382,306.8	11,924,253.9	11,910,655.1	11,940,431.74	12,358,346.85	12,852,680.72	13,431,051.36	13,431,051.36
S. 11 Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan usaha mikro									
IS.16	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	10,28	11,02	11,45	11,64	11,66	12,09	12,25	12,25
IS.17	Persentase Pertumbuhan UM Mandiri	2,58	3,01	3,36	3,42	3,48	3,54	3,60	3,60

Sumber : P-RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024

Tabel 7.2
Keterhubungan (Cascading) Renstra Diskopindag dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Nilai PDRB					11.434.543,7	12.006.270,9	12.625.794,5	13.301.274,5	14.040.825,3	14.852.385,0	15.746.498,6	15.746.498,6
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan Dalam Negeri			10,94	12,01	12,42	13,00	13,11	13,41	13,93	13,93
				1. Meningkatnya Volume Perdagangan	Volume Usaha Perdagangan	853,70	878,38	873,85	875,90	884,10	892,90	902,80	902,80
				2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Formal	Persentase Pertumbuhan Industri Formal	3,15	2,75	2,97	3,17	2,80	4,73	4,89	4,89
Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas					10,28	11,02	11,45	11,64	11,66	12,09	12,25	12,25
	Persentase Pertumbuhan UM Mandiri					2,58	3,01	3,36	3,42	3,48	3,54	3,60	3,60
				3. Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UM Mandiri	Persentase Koperasi Sehat	N/A	48,16	52,70	46,98	51,06	51,39	52,05	52,05
					Persentase Pertumbuhan UM Mandiri	2,58	2,76	3,18	3,42	3,48	17,09	17,32	17,32

**TABEL INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2024
SESUAI PMDN NO 17 TAHUN 2021 YANG DIAMPU OLEH DISKOPINDAG**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	REALISASI KINERJA SEBELUM KINERJA AWAL (PREBASELINE)		2018	REALISASI		TARGET PADA PERUBAHAN RPJMD 2019-2024				Target Akhir Kinerja RPJMD
			2016	2017		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas*	%	-	-	10,28	11,02	11,45	11,64	11,66	12,09	12,25	12,25
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha*	%	-	-	-	4,98	5,32	5,78	5,84	5,9	5,97	5,97
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	7,55	6,8	4,57	8,99	(5,53)	9,76	10,50	11,24	11,98	11,98
2	Pertumbuhan nilai ekspor non migas*	%	8,99	7,44	4,22	0,73	4,78	0,69	0,82	2,33	3,84	3,84
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*	%	-	-	34,78	30,43	21,74	26,74	26,85	26,96	27,07	27,07
4	Persentase kinerja realisasi pupuk*	%	-	-	-	19,55	11,5	11,63	12	12,25	12,5	12,5
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku*	%	34,07	33,6	31,86	30,93	32,55	30,89	30,32	29,75	29,18	29,176
6	Persentase penanganan pengaduan konsumen*	%	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok*	%	-	-	-	49,91	37,5	37,95	38,49	39,05	39,42	39,42
8	Inflasi Pangan bergejolak*	%	-	-	-	-	-	3,01	3,02	3,11	3,15	3,15
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	5,58	4,74	5,8	4,85	(1,75)	5,44	5,58	5,73	5,88	5,88
2	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas*	%	5,58	4,74	5,8	4,85	(1,75)	5,44	5,58	5,73	5,88	5,88

3	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB*	%	3,45	3,44	3,5	3,61	3,61	3,67	3,72	3,77	3,81	3,81
4	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (Rp Juta)*	juta rupiah	-	-	6,75	95,45	85,00	80,00	95,15	99,00	117,00	117,00
5	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas*	orang	4.837	6.891	8.895	5.056	1.561	832	1.256	2.094	2.932	2.932
6	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Milyar)*	milyar rupiah	18,56	54,52	60,92	20,47	14,88	9,02	13,16	17,30	21,44	21,44

BAB VIII PENUTUP

Renstra Diskopindag Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Diskopindag pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 142,9 atau sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu :

Aspek koperasi dan usaha mikro :

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UM, Pertumbuhan usaha mikro berlegalitas dan berkembang, Akses permodalan yang mendukung.

Aspek Perindustrian :

Peingkatan jumlah IKM yang berlegalitas, Standarisasi produk IKM (sertifikasi halal, SNI, HACCP, ISO, BPOM), Peningkatan daya saing produk (desain, packaging) dan HKI, Pengembangan industri kreatif.

Aspek Perdagangan :

Perluasan akses pemasaran dan sarana promosi produk UM dan IKM, Pengembangan kemitraan dengan retail, marketplace dan platform lainnya, Optimalisasi metrologi legal (tera/tera ulang), Peningkatan kualitas sarana prasarana distribusi perdagangan (pasar) dan pengelolaannya.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Diskopindag Kabupaten Sampang mendukung pada misi 2 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif” serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan usaha mikro” dan sasaran “Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Diskopindag selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Diskopindag.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Diskopindag dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Diskopindag dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI